

**KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN JALUR PENDAKIAN PALUTUNGAN  
PADA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI**

**KITAM**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Administrasi Publik  
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana  
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon



Disusun oleh :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. AGUS ANTO JUANTO     | NIM. 124140002 |
| 2. APRILIA SABILA PUTRI | NIM. 124140030 |

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI  
CIREBON  
2026**


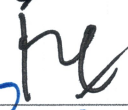
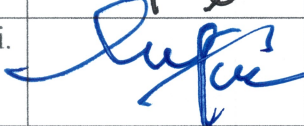
## LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN ARTIKEL KITAM

Nama Mahasiswa 1 : Agus Anto Juanto  
NIM : 124140002  
Nama Mahasiswa 2 : Aprilia Sabila Putri  
NIM : 124140030  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : Kolaborasi dalam Pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai

Artikel KITAM telah diperbaiki sesuai saran Dosen Kolabolator, Dosen Kolabolator Pendamping, dan Penelaah dalam KPA KITAM yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Januari 2026

Menyetujui atas perbaikan Artikel KITAM :

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Moh Taufik Hidayat, Drs., M.Si (Dosen Kolabolator)		12/2 '26
2.	Dr. Nursahidin, S.Sos., M.Si (Dosen Kolabolator Pendamping)		12/2 '26
3.	Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si. (Penelaah)		13/2 '26

Cirebon,

Februari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Moh Taufik Hidayat, Drs., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nursahidin, S.Sos., M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN JALUR PENDAKIAN PALUTUNGAN  
PADA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI**

**KITAM**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Administrasi Publik  
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana  
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon**

**Disusun oleh :**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>1. AGUS ANTO JUANTO</b>     | <b>NIM. 124140002</b> |
| <b>2. APRILIA SABILA PUTRI</b> | <b>NIM. 124140030</b> |

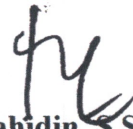
**Cirebon, Februari 2026**

**Dosen Kolaborator**



**Dr. Moh. Taufik Hidayat, Drs., M.Si.**

**Dosen Kolaborator Pendamping**



**Dr. Nursahidin, S.Sos., M.Si.**

## KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN JALUR PENDAKIAN PALUTUNGAN PADA TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI

Agus Anto Juanto <sup>1</sup>, Aprilia Sabila Putri <sup>2</sup>, Moh. Taufik Hidayat <sup>3</sup>, Nursahidin <sup>4</sup>

### Abstrak

Penguatan pengusahaan pariwisata alam didorong oleh kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Jalur Pendakian Palutungan merupakan salah satu destinasi wisata di Taman Nasional Gunung Ciremai. Pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang berada dalam naungan Koperasi Rimba Cipta Lestari (Ricis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan faktor serta upaya melalui hubungan kolaborasi yang dilaksanakan antara BTNGC dan Ricis dengan menggunakan teori proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, melalui proses wawancara dengan informan menggunakan teknik purposive sampling, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan melalui kondisi awal kolaborasi antara BTNGC dengan Ricis. Desain kelembagaan pada pengelolaan jalur pendakian Palutungan dapat dikatakan telah memenuhi elemen dasar kolaborasi. Kepemimpinan BTNGC mampu memfasilitasi dialog lintas sektor melalui Forum Wisata Ciremai dan pendekatan informal yang mampu menjembatani kepentingan antar sektor. Proses pengambilan keputusan mengutamakan partisipatif dan musyawarah, yang mana setiap aktor utama menyampaikan gagasan dan ide pada forum lintas sektor untuk merancang dan melaksanakan program yang akan disusun. Proses kolaborasi yang dihasilkan meningkatkan pengusahaan jalur pendakian palutungan, pengembangan dari pariwisata pendakian, memberikan manfaat ekonomi kepada Masyarakat lokal. Faktor penghambatnya komunikasi yang terbatas dan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan kolaborasi. Kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi dari BTNGC merupakan langkah komunikasi dan peningkatan kualitas SDM untuk perbaikan dalam proses kolaborasi antara BTNGC dan Ricis dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan Pendakian, Taman Nasional

### Pendahuluan

Penguatan pengusahaan pariwisata alam didorong oleh kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta berbagai regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.(Peraturan Pemerintah, 2010)

Pariwisata alam sebagai sektor yang multidimensi, sangat potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar dapat melestarikan dan melindungi budaya dan warisan sumberdaya alam (Purbantoro, 2022). Selain itu, salah satu prinsip dari pariwisata alam dapat diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat, hal ini sejalan dengan proses pengelolaan pariwisata di Indonesia yang sudah banyak dilakukan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam prosesnya dapat dilakukan melalui kolaborasi antar sektor

serta pemangku kepentingan. (Anindisa et al., 2017)

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) merupakan kawasan konservasi yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata daerah di Jawa Barat dengan kondisi alam yang dimiliki, menjadikan potensi wisata yang lengkap mulai dari Gunung Ciremai, bumi perkemahan, air terjun atau curug dan destinasi wisata lainnya (Syamsudin et al., 2020). Gunung Ciremai salah satu gunung favorit bagi para pendaki dengan puncak ketinggian 3.078 mdpl memiliki pesona yang memberikan eksotisme keindahan alam. Sebagai gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan sejarah adat budaya yang kental, Gunung Ciremai menjadi daya tarik bagi para pecinta alam dari penjuru negeri. (Rossada & Prihatini, 2012)

Jalur Pendakian Palutungan salah satu jalur pendakian Gunung Ciremai yang berada di kawasan TNGC yang menjadi wisata minat khusus favorit dan unggulan, pada tahun 2024 tercatat jumlah pendaki sebanyak 16.885 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2022 sebanyak 10.179 orang dan tahun 2023 sebanyak 10.142 orang. Dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan terdapat beberapa pihak pengelola, diantaranya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) selaku regulator dan Koperasi Rimba Cipta Sejahtera (Ricis) selaku operator jalur pendakian Palutungan. Kedua pihak melakukan kerjasama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan Koperasi Rimba Cipta Sejahtera nomor: PKS.112/T.33/TU/ HMS.2.0/12/2021 dan nomor : 03/KOP.RICIS/XII/2021 tentang Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Jalur Pendakian Palutungan. (Inama et al., 2024; Pereira, 2022)

Kerjasama ini telah terjalin sejak tahun 2021 dan dalam pengelolaan yang dilakukan masih ada beberapa permasalahan yang terjadi. Hal itu terlihat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat dan disepakati bersama, tetapi pada implementasi PKS tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) pengelola jalur pendakian Palutungan masih terbatas dan kurangnya pemahaman terhadap isi dari PKS serta lemahnya komitmen yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Para pihak yang berkolaborasi yaitu BTNGC dan Ricis harus memahami secara jelas tugas dan perannya masing-masing dalam melakukan pengelolaan. Hal tersebut menyebabkan kerjasama dari kolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata dapat tercapai. (Heriyoko, 2023)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan kolaborasi dalam pengelolaan wisata diberbagai daerah. Wayan Suteja et al. (2021) meneliti partnership collaboration dalam pengelolaan desa wisata ekologis di kawasan geopark Kotaraja Kabupaten Lombok Timur, dan menemukan program bersama yang dapat mendukung perkembangan wisatanya, hal ini dapat dilakukan dengan penerapan partnership management model sehingga terbangun pengelolaan pariwisata yang kuat. (Pratiwi & Alikodra, 2021)

Sementara Ramadhani et al. (2022) dalam penelitiannya tata kelola pengembangan wisata pendakian Gunung Sumbing (studi kasus : jalur pendakian Dukuh Seman), dan menemukan potensi pariwisata, profil wisatawan, faktor-faktor berpengaruh terhadap permintaan wisatawan, estimasi valuasi ekonomi, peran stakeholders serta strategi pengembangan wisata pendakian. (Aulia, 2021)

Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Astuti et al., 2020). Hasil penelitian (Kurniasari, 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan objek wisata di Pulau Abang adalah karena adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Batam dengan Dinas Pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan kitar dengan judul : Kolaborasi dalam Pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bentuk kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman actor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai. (Huberman & Miles, 1992)

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2002), Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode ini menggunakan focus grup, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.

Selanjutnya, (Creswell & Creswell, 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data pada parsial kedalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu strategi dalam metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti menyelidiki secara mendalam dan holistic terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Creswell (2014), studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap individu tau kelompok. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu berkesinambungan. (Nasution, 2017)

Informan dalam penelitian ini adalah BTNGC (Koordinator Kerjasama, Perumus Pendakian, Kepala Resort Pemanfaatan SPTN I Kuningan, Suvervisor Jalur Palutungan), Risis (Ketua, Sekertaris, Bendahara, Anggota), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, Kepala BPBD Kuningan, Ketua Koperasi Edelwis, LSM Akar, Ketua Forum Ciremai, Ranger atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi studi literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Analisis data dibagi dalam tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Moleong, 2002)

## **Tinjauan Teori**

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan institusi di luar pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa arena kemitraan, yaitu: (1) kolaborasi antara institusi pemerintah (internal), (2) kolaborasi antara institusi pemerintah dan institusi bisnis; dan (3) kemitraan antara pemerintah dan Lembaga masyarakat sipil (Dwiyanto, 2011).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Emerson et al., 2012; Hidayat & Marsono, 2020).

Menurut O'Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan collaboration sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "public value" ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Sedangkan menurut Simatupang dan Sridharan (2008), Kolaborasi adalah usaha untuk menghimpun berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, dengan tujuan mencapai visi bersama, mencapai kesepakatan dalam menghadapi masalah, mencari solusi untuk masalah tersebut, serta mendorong nilai bersama untuk menghasilkan keputusan. Leever (2010) juga memiliki pandangan serupa menyatakan bahwa kolaborasi adalah konsep yang menggabungkan pemikiran dari pihak-pihak tertentu dalam upaya kerjasama. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah solusi untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh individu tau organisasi. (Imtiyaza, 2024)

Ansell & Gash, (2008) dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governace* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama yakni terdiri dari: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi.

## **1) Kondisi awal**

Kondisi di awal yaitu mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara Lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variable besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, sejarah di masa lalu yang terjadi berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan, dan bentuk dorongan serta kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

## **2) Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi pada kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

## **3) Kepemimpinan**

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik atau perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar kepada pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

## **4) Proses kolaboratif**

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Proses kolaboratif dapat dimulai dari mana saja dari kelima proses tersebut:

### **a. Dialog tatap muka**

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

### **b. Membangun kepercayaan**

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

### **c. Komitmen dalam proses kolaborasi**

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

### **d. Pemahaman bersama**

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

### **e. Hasil antara (pertengahan)**

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat

dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

## **5) Outcome Kolaborasi dalam Pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan**

Outcome pada kolaborasi ini dapat berupa perubahan atau hasil yang diharapkan dari proses kolaborasi yang mencakup beberapa aspek, yaitu: kualitas keputusan kolaborasi, efektivitas implementasi kolaborasi, dampak sosial dan lingkungan kolaborasi, serta peningkatan kapasitas kolaborasi. Dengan demikian, variabel outcome mencakup aspek-aspek yang luas dan komprehensif, tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kolaborasi dan dampaknya terhadap stakeholders yang terlibat. (Miller, 2007)

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dan regulasi turunannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa penyelenggaraan kerja sama dalam memfasilitasi kebutuhan mitra dan masyarakat serta menampung permasalahan di sekitar kawasan konservasi. (Triana & Alikodra, 2014)

Penelitian ini fokus pada kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kolaborasi antar BTNGC dengan Ricis dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan melalui PKS (Perjanjian Kerjasama), dan *stakeholder* lainnya sebagai penunjang kolaborasi. Serta mengetahui dan upaya faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut.

Kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan berjalan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak, dengan BTNGC atau pemerintah sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab mengambil kebijakan. Dari hasil observasi di lapangan, ditemukan adanya faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kolaborasi, sehingga BTNGC berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan kolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Upaya ini juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi semua *stakeholder* agar tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks pengelolaan jalur pendakian Palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance* dari (Ansell & Gash, 2008) sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini menekankan komponen penting dalam proses kolaborasi yang efektif.

### **1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)**

Kondisi awal kolaborasi antara BTNGC dengan Ricis dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Pada awalnya sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Deklarasi Menteri Kehutanan pengelolaan masih dilakukan oleh perhutani, kemudian perhutani menyerahkan agar masyarakat mengelola pendakian dan diarahkan membentuk kelompok untuk membuat izin jasa, lalu dibentuk Koperasi Rimba Cipta Lestari (Ricis) dan terikat oleh Kerja Sama (PKS) dengan BTNGC, setelah itu dibentuk Mitra Pengelolaan Pendakian Gunung Ciremai (MPPGC).

Proses kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan didasarkan untuk mengelola, melestarikan dan mengoptimalkan bisnis dibidang kehutanan berbasis wisata alam minat khusus atau pendakian Gunung Ciremai. Yang kemudian dalam prosesnya BTNGC memiliki keterbatasan dalam hal sumberdaya manusia (SDM) yang mana mereka tidak dapat bekerja sendiri. Selain itu, sebagai bentuk untuk mewujudkan visi dan misi BTNGC dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) melalui pemberdayaan masyarakat yang di wadahi oleh Ricis. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh kawasan TNGC sebagai aset negara dan memberikan kebermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Semua pihak telah menyetujui adanya hubungan kemitraan melalui PKS, adapun pihak-pihak yang menyetujui tidak hanya dari BTNGC dan Ricis saja melainkan masyarakat sekitar juga sangat menyetujui dan mendukung hubungan kemitraan ini. Karena masyarakat merasa adanya kemitraan ini memberikan dampak positif dalam mendukung perputaran ekonomi mereka salah satunya dengan

diberikan kesempatan menjadi ranger, pemandu, porter, ojek, home stay dan memiliki kios warung untuk berdagang di sekitar area jalur pendakian Palutungan. Proses ini menghasilkan :

- a. Munculnya kesadaran bersama mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.
- b. Membuka jalur komunikasi antar aktor yang berkolaborasi melalui forum rutin seperti adanya forum wisata Ciremai.
- c. Kepercayaan awal dibangun antar aktor terutama pada saat keberhasilan pengelolaan jalur pendakian palutungan.
- d. Munculnya kepemimpinan yang sukses dalam menanggapi tantangan tahap awal.

## **2. Desain Kelembagaan (Institutional Design)**

Dalam kerangka kolaborasi, desain kelembagaan merupakan komponen penting yang menjamin adanya legitimasi prosedural, yaitu seperangkat aturan dasar yang membingkai interaksi antar aktor dalam proses kolaborasi. Ansell & Gash, (2008) menekankan bahwa desain kelembagaan yang efektif harus mampu memberikan kejelasan peran, tanggung jawab, dan prosedur kerja sama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. BTNGC berperan sebagai arsitek utama dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang bersifat proaktif, transparan, serta mampu menciptakan kepercayaan di antara actor yang terlibat.

Dalam konteks pengelolaan jalur pendakian Palutungan, desain kelembagaan telah ditopang oleh sejumlah regulasi yang menjadi dasar kolaborasi antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Perjanjian Kerja Sama antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan Koperasi Rimba Cipta Sejahtera nomor: PKS.112/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 dan nomor : 03/KOP.RICIS/XII/2021 tentang Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Wisata Alam di ODTWA Jalur Pendakian Palutungan.
- Protap Pendakian Gunung Ciremai.

Keberadaan regulasi ini tidak hanya memberikan dasar legal dan prosedural bagi pelaksanaan kolaborasi, tetapi juga membentuk struktur dan mekanisme kelembagaan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Desain kelembagaan yang tertuang dalam PKS telah mengidentifikasi arah pengembangan berbasis ekowisata, yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk wisata alam yang melibatkan lokal dan peningkatan kualitas infrastruktur pada jalur pendakian (Zuhriana & Alikodra, 2013). Rencana ini juga memuat strategi kolaborasi dalam skema kolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan kawasan TNGC. (Utami & Pancasilawan, 2017)

Proses kolaborasi pada pengelolaan jalur pendakian Palutungan telah berjalan dengan mengacu pada kerangka regulatif yang jelas dan terstruktur. Kejelasan aturan ini mendorong terbentuknya sinergi antar pemangku kepentingan. BTNGC tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menjalankan fungsi fasilitasi melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan kelembagaan Ricis. Disisi lain, partisipasi aktif dari Dinas Pariwisata kabupaten Kuningan, BPBD Kabupaten Kuningan, LSM Akar, dan Forum Ciremai berpartisipasi aktif memperkuat fungsi kontrol dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

Desain kelembagaan pada pengelolaan jalur pendakian Palutungan dapat dikatakan telah memenuhi elemen dasar kolaborasi adanya forum diskusi yang inklusif, pembagian peran yang jelas, serta legitimasi aturan yang kuat.

## **3. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)**

Kepemimpinan dalam kolaborasi pengelolaan jalur pendakian Palutungan dilakukan oleh BTNGC sebagai peran kepemimpinan fasilitatif, yang bertindak sebagai penggerak utama kolaborasi. BTNGC mempunyai peran strategis dalam membangun komitmen dan memobilisasi seluruh elemen menuju tujuan meningkatkan dan mengembangkan pengusahaan wisata alam berbasis masyarakat pada jalur pendakian Palutungan.

Kepemimpinan BTNGC mampu memfasilitasi dialog lintas sektor melalui Forum Wisata Ciremai dan pendekatan informal yang mampu menjembatani kepentingan antar sektor. Kepemimpinan ini menciptakan ruang aman bagi semua pihak untuk membahas tantangan dan mencari solusi bersama.

Salah satu inovasi yang muncul dari gaya kepemimpinan pasilitatif adalah adanya program perusahaan wisata berbasis masyarakat. Program ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi berbasis kearifan lokal, yang mengharuskan masyarakat lokal berperan aktif dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. (Vandayani & Widiyarta, 2022)

BTNGC mendorong pemberdayaan atau upaya pembelajaran dengan memberikan bimbingan kepada anggota Ricis melalui peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat berupa pelatihan SAR, pemandu gunung, pelatihan kelola organisasi, study banding pengelolaan wisata alam, pengelolaan sampah dan pelatihan penyediaan makanan dan minuman. Model ini memperkuat sinergi dan mempercepat penyebaran informasi untuk menjadikan solusi yang kontekstual. (Mahmud & Kasmahidayat, 2025)

Dalam menghadapi perbedaan kepentingan, kepemimpinan juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik dan membangun kesepakatan. Proses musyawarah secara terbuka menjadi mekanisme utama dalam meredakan potensi ketegangan, sehingga kolaborasi dapat terus berlanjut dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Proses ini menghasilkan :

- a. Tumbuhnya kepercayaan di antara para aktor berkat gaya kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka.
- b. Meningkatnya keterikatan antar sektor, dengan pertemuan rutin.
- c. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai inovasi kolaborasi yang pengelolaan berbasis masyarakat
- d. Munculnya inovasi pengembangan wisata pada jalur pendakian Palutungan.
- e. Peningkatan keterlibatan pemimpin dalam peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok.
- f. Mekanisme penyelesaian konflik berbasis dialog yang mendukung keberlanjutan pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

#### **4. Proses kolaboratif (Collaborative Process)**

Proses kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya sinergi antar aktor, baik dari BTNGC maupun dari Ricis. Dalam pendekatan kolaborasi, proses menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas dan keberhasilan kolaborasi, bukan hanya pada capaian akhirnya. Salah satu bentuk kongkret dari proses ini adalah keterlibatan aktor utama yaitu BTNGC dan Ricir dalam pengelolaan jalur pendakian palutungan. Aktor utama merumuskan solusi berdasarkan kebutuhan pengelolaan jalur pendakian. (Wardojo, 2021)

Proses pengambilan keputusan mengutamakan partisipatif dan musyawarah, yang mana setiap aktor utama menyampaikan gagasan dan ide pada forum lintas sektor untuk merancang dan melaksanakan program yang akan disusun. Dinamika kolaborasi ini adalah pengelolaan jalur pendakian Palutungan yang akan dikelola oleh mitra masyarakat lokal. (Khofipatu et al., 2023)

Komunikasi secara transparan menjadi pondasi dalam kolaborasi ini, melalui komunikasi lintas sektor, setiap pemangku menyampaikan pendapat disertai data pendukungnya. Transparansi ini mendukung perencanaan berbasis data dan menumbuhkan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan.

Memastikan keberlanjutan kolaborasi forum komunikasi rutin diselenggarakan baik formal maupun informal sebagai ruang untuk saling mengingatkan, memperbaharui informasi, menyelesaikan masalah secara bersama. Terdapat 5 (lima) unsur penting dalam proses kolaborasi :

##### **a. Dialog tatap muka (Face-to-Face Dialog)**

Dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan, dialog tatap muka menjadi sarana utama untuk menyamakan persepsi, menyusun agenda bersama, dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Forum Ciremai selaku wadah dari pelaku usaha wisata alam di Gunung Ciremai merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan dialog tatap muka ini. Forum ini berfungsi sebagai ruang musyawarah di mana aktor dapat duduk bersama membahas berbagai aspek strategis dalam sektor pariwisata. Beberapa topik utama yang sering dibahas meliputi daya dukung dan daya tampung pendaki, protap pendakian Gunung Ciremai, potensi peningkatan pelayanan kepada pendaki, pendapatan daerah dari sektor pariwisata, hingga promosi pendakian.

Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi dan pemecahan masalah secara kolektif. Stakeholder dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi di lapangan dan merumuskan solusi secara

partisipatif. Dengan demikian, dialog tatap muka bukan sekadar forum komunikasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membentuk tata kelola yang adaptif dan kolaboratif. Keberlangsungan dan efektivitas forum semacam ini sangat tergantung pada konsistensi dan frekuensi pelaksanaannya. Semakin rutin dan terstruktur dialog tatap muka dilakukan, maka semakin besar peluang untuk mengatasi ketimpangan informasi dan memperkuat relasi antar actor dan sangat menentukan keberhasilan kolaborasi jangka panjang dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

#### **b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)**

Proses ini berlangsung secara bertahap melalui interaksi intensif antara aktor-aktor utama dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Kepercayaan tidak dibentuk secara instan, melainkan tumbuh seiring dengan terjalannya komunikasi terbuka, pembagian informasi yang adil, dan pelibatan masyarakat sekitar kawasan TNGC. Salah satu strategi membangun kepercayaan adalah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai jembatan antara BTNGC dengan masyarakat.

Partisipasi aktif para tokoh dalam meningkatkan legalitas program dimata masyarakat lokal yang memiliki ikatan emosional untuk upaya edukasi dan pendampingan. Membangun kepercayaan memperlihatkan bahwa dibangun di atas konsistensi tindakan, transparansi kebijakan dan adanya ruang dialog yang setara.

Proses membangun kepercayaan masyarakat lokal dengan metode menceritakan kisah sukses ditempat lain dalam melaksanakan kolaborasi untuk menumbuhkan keyakinan bahwa kolaborasi dengan BTNGC dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan akan menghasilkan dampak yang nyata. Kesenambungan pertemuan lintas sektor membuat keberlanjutan kolaborasi melalui pertemuan formal dan informal dengan masyarakat lokal. Pertemuan yang konsisten akan menumbuhkan kerjasama dan secara bertahap menumbuhkan rasa saling percaya antara BTNGC dan masyarakat lokal untuk berkolaborasi.

#### **c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*Commitment to Proses*)**

Komitmen yang terlihat anatar BTNGC dan Ricis dalam kolaborasi pengelolaan jalur pendakian masih kuat. Anggota Ricis terlihat kurang tanggung jawab memperlihatkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat masih banyak yang belum ikut berpartisipasi dalam pelibatan pengelolaan jalur pendakian Palutungan karena banyak pemuda yang memilih untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih terjamin. dalam kolaborasi yang terjadi kurang adanya rasa salaling ketergantungan satu sama lain, hasilnya kolaborasi kurang maksimal.

#### **d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)**

Pemahaman antara pihak-pihak untuk visi atau tujuan dari pengelolaan jalur pendakian Palutungan masih kurang maksimal, hal ini ditunjukkan oleh beberapa pihak Ricis masih belum bisa menyebutkan visi yang diinginkan, bahkan anggota Ricis tidak mengetahui visi dan misinya. Tujuan yang dipahami oleh berbagai pihak sudah sama intinya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat. Pemahaman yang kurang dalam visi dan misi ini dapat mengakibatkan terjadi masalah dikemudian hari, selain itu karena cara dalam mencapai tujuan bersama tersebut berbeda. Hal ini menunjukkan bawasannya *share understanding* dalam kolaborasi ini belum maksimal.

#### **e. Hasil antara (*Intermediate Outcomes*)**

Hasil antara pada kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kemenangan kecil (*small wins*). Belum matangnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Ricis membuat proses kolaborasi anatar Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan Ricis cenderung lambat. Dapat ditunjukkan dengan belum dilaksanakannya beberapa kewajiban yang tertuang dari PKS yang merupakan komitmen Ricis dalam proses kolaborasi.

Selain Perjanjian Kerja Sama (PKS), hasil capaian lain dari kolaborasi yaitu adanya kemenangan kecil (*small wins*) yang terdiri dari :

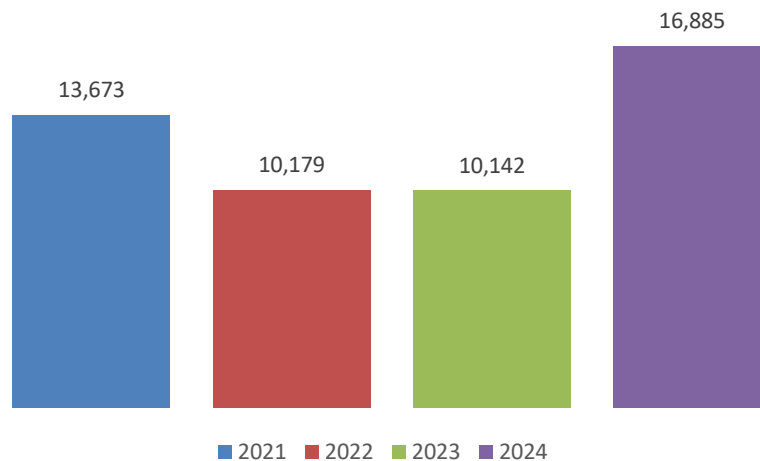
- Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata alam (pendakian Gunung Ciremai).
- Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat berupa pelatihan.
- Pelayanan pendakian oleh ranger di jalur pendakian Palutungan.
- Promosi wisata pendakian melalui media sosial dan pameran (festival).
- Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pembangunan ekonomi lokal.

## 5. Outcome Kolaborasi dalam Pengelolaan Jalur Pendakian Palutungan

Kerangka teori kolaborasi Ansell & Gash, (2008), proses kolaborasi yang dihasilkan dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan yang dihasilkan :

### a. Meningkatkan pengusaha jalur pendakian Palutungan

Hasil nyata dari kolaborasi pengelolaan jalur pendakian Palutungan yaitu meningkatnya jumlah pendaki Gunung Ciremai.



Gambar 1. Jumlah Pendaki Pada Jalur Palutungan

### b. Pengembangan dari wisata pendakian

Kolaborasi ini menghasilkan pengembangan wisata pendakian Gunung Ciremai yaitu berupa Hiking Cigowong. Inovasi pengembangan wisata ini menjadi salah satu favorit bagi kalangan pendaki pemula. Bagi yang belum siap untuk mendaki ke puncak Gunung Ciremai, Hiking Cigowong merupakan pilihan untuk merasakan pendakian ringan karena cukup sampai pos 1 jalur pendakian Palutungan. (Aulia, 2021)

### c. Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.

Pengelolaan kolaboratif jalur pendakian Palutungan memberikan kesempatan untuk menunjukkan peran BTNGC dalam mengentaskan kemiskinan dan menyediakan mata pencaharian berkelanjutan di desa penyangga kawasan TNGC yang selama ini kurang tersentuh program pembangunan. Masyarakat merasa adanya kolaborasi ini memberikan dampak positif dalam mendukung perputaran ekonomi mereka salah satunya dengan diberikan kesempatan menjadi ranger, pemandu, porter, ojek, home stay dan memiliki kios warung untuk berdagang di sekitar area jalur pendakian Palutungan.

d. Hubungan antara BTNGC dengan masyarakat lokal telah berubah, dari konflik menjadi partisipasi, kemitraan, kolaborasi. Kawasan TNGC pada awalnya ditunjuk untuk melindungi satwa liar, tumbuhan, daerah tangkapan air, serta sumber daya alam didalamnya yang dibebaskan dari kehadiran manusia. Pandangan ini sekarang sudah mulai berubah menjadi pengelolaan TNGC bersama masyarakat. Kesadaran akan pentingnya upaya mengamankan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan TNGC telah mendorong kearena kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. BTNGC, masyarakat lokal, pengguna sumber daya alam, dan instansi terkait lainnya. Program-program konservasi untuk pembangunan menjadi sangat penting dalam membangun modal sosial, kapasitas lokal, dan kelembagaan untuk memperkuat pengelolaan kawasan TNGC.

e. Kolaborasi menjadi alat manajemen yang penting dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Proses kolaborasi dapat membangun dan memperkuat kemitraan antara BTNGC dengan masyarakat lokal dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Proses kolaborasi meliputi berbagai aktifitas untuk mengembangkan visi dan

tujuan bersama, membangun rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling memberikan manfaat antarpihak yang berkolaborasi yaitu BTNGC dengan Ricis.

f. Tantangan dan evaluasi

Kolaborasi memberikan kemajuan yang signifikan, terdapat beberapa tantangan yaitu keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem pemantauan, kurangnya pendampingan. Hasil dari kolaborasi bersifat dinamis yang harus dievaluasi secara berkala untuk berkelanjutan dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

### **Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan Kolaborasi**

Terdapat faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Hambatan ini berkaitan dengan aspek komunikasi serta dinamika sosial dan budaya masyarakat.

#### **a. Komunikasi yang Belum Maksimal**

Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat atau anggota Ricis yang belum memahami tujuan, manfaat, maupun peran mereka dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Komunikasi yang terbatas ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan kolaborasi. Minimnya informasi menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman antara pihak BTNGC dan Ricis serta actor lainnya. memperlemah rasa memiliki terhadap program pengembangan wisata pendakian, serta memperbesar potensi konflik dan resistensi sosial. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, manfaat, dan peran mereka dalam pengelolaan jalur pendakian. Selain itu, melakukan pendampingan kepada masyarakat dan anggota RICIS untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolaborasi terhadap informasi yang relevan dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

#### **b. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar penting dalam mendukung keberhasilan *collaborative governance*. Kompetensi aktor-aktor yang terlibat, baik dari sisi BTNGC, Ricis, maupun masyarakat, menentukan efektivitas kerja sama dan pengambilan keputusan. Pembuatan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan serta pelaporan menjadi salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi solusi untuk keberlanjutan pengelolaan jalur pendakian Palutungan. Masih banyak Masyarakat yang sering membangun bangunan seenaknya tanpa izin jasa dan sarana prasarana yang tidak memadai. Selain itu, BTNGC belum bisa menempatkan petugas di jalur pendakian dan tempat wisata lainnya karena area tersebut dikuasai oleh Masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hambatan ini, dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kerjasama dengan masyarakat, mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, pengelolaan BTNGC dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman. (Wismayanti, 2024)

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian yang menunjukkan kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan dilihat melalui model *collaborative governance* Ansel dan Gash masih belum terlaksana secara maksimal disebabkan karena hubungan kolaborasi menunjukkan hasil yang kurang komitmen dan pemahaman dalam mencapai tujuan. Hasil antara belum memiliki target kewajiban dalam PKS (Perjanjian Kerjasama). Faktor penghambatnya komunikasi yang terbatas dan kualitas sumber daya manusia berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan kolaborasi. Serta, masih banyak masyarakat yang membangun bangunan tanpa izin jasa dan sarana yang tidak memadai. Selain itu, BTNGC belum bisa menempatkan petugas di jalur pendakian karena keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang harus melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar. Walaupun saat ini petugas di BTNGC sudah terbagi sesuai tupoksinya, namun dibandingkan dengan ruang lingkup tugas senantiasa belum seimbang. Kegiatan melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi dari BTNGC serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan merupakan langkah komunikasi dan peningkatan kualitas SDM dalam proses kolaborasi antara BTNGC dan Ricis dalam pengelolaan jalur pendakian Palutungan.

## Daftar Pustaka

- Anindisa, M., Basuni, S., & Sunarminto, T. (2017). *Stakeholders of Nature Tourism Management in SPTN Area II Majalengka, Gunung Ciremai National Park*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachmi, A. (2020). *Collaborative Governance from the Perspective of Public Administration*. Diponegoro University Press.
- Aulia, F. (2021). *Tourism Development Collaboration in Kubu Gadang Tourism Village*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. In *Journal of Public Administration Research and Theory* (Vol. 22, Issue 1). Oxford University Press.
- Heriyoko, Y. (2023). *Collaborative Governance in the Development of the Keputih Bamboo Forest Tourist Attraction in Surabaya*.
- Hidayat, R., & Marsono, D. (2020). *Social Capital of Communities in the Buffer Zone of Gunung Ciremai National Park to Support Partnership-Based Management Schemes*.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UIPress. Jakarta.
- Imtiyaza, H. (2024). *Collaborative Governance in the Development of Kaliwlingi Tourism Village in Brebes Regency*.
- Inama, Suhajito, D., & Trison, S. (2024). *Livelihood Strategies for Conservation Partnership Groups in Gunung Ciremai National Park*.
- Khofipatu, I., Myrta, R., & Candradewini. (2023). Collaboration in the Management of Gunung Galunggung Tourism Forest in Tasikmalaya Regency. *Journal of State Administration*.
- Kurniasari, R. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wisata Maritim di Kota Batam= Collaboration of Local Governments in Maritime Tourism Management in Batam City*.
- Mahmud, H., & Kasmahidayat. (2025). *Analysis of the Potential of Mount Merbabu National Park for Ecotourism Development*.
- Miller, G. T. (2007). *Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions*. Thomson Brooks/Cole.
- Moleong, L. J. (2002). *Qualitative Research Methodology*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49–55.
- Pereira, N. A. (2022). *Empowerment of the Community of Cisantana as a buffer village of Gunung Ciremai National Park through Ecotourism Program*.
- Pratiwi, S., & Alikodra, H. S. (2021). *Ecotourism Assessment in Gunung Halimun National Park*.
- Purbantoro, N. S. (2022). *The Influence of Tourist Attractions on the Interest in Returning to Mount Merbabu National Park (Case Study of the Via Selo Climbing Route)*.
- Rossada, D., & Prihatini, E. R. (2012). *Collaborative Management of National Parks in Indonesia*. IPB Press.
- Syamsudin, T., Kosmaryandi, N., & Nopiansyah, F. (2020). *Evaluation of Natural Tourism Objects Potential in Nature Tourism Resort Kuningan National Park Management Section I Gunung Ciremai National Park*.
- Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (2010).
- Triana, E., & Alikodra, H. S. (2014). *Conservation Collaboration in the Ciwidey Tourism Area*.
- Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2017). *Collaboration in the Management of the Gunung Masigit Kareumbi Hunting Reserve Conservation Area in West Java Province*.
- Vandayani, D. S., & Widiyarta, A. (2022). *Collaborative Governance in the Development of Kampung Majapahit as a Tourist Village in Bejjong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency*.
- Wardojo, W. (2021). *Inspiration from Mount Gede Pangrango*. Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation.
- Wismayanti, K. W. (2024). *Collaborative Governance*. Deepublish.
- Zuhriana, R., & Alikodra, H. S. (2013). *Employment Opportunities Enhanced for Local Community Based on Ecotourism at Gunung Ciremai National Park*.

## COLLABORATION IN THE MANAGEMENT OF THE PALUTUNGAN CLIMBING ROUTE IN CIREMAI MOUNTAIN NATIONAL PARK

Agus Anto Juanto <sup>1</sup>, Aprilia Sabila Putri <sup>2</sup>, Moh. Taufik Hidayat <sup>3</sup>, Nursahidin <sup>4</sup>

### Abstract

The strengthening of nature tourism is encouraged by national policies as stipulated in Government Regulation No. 36 of 2010 concerning Nature Tourism in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Parks. The Palutungan Climbing Trail is one of the tourist destinations in Gunung Ciremai National Park. The management of the Palutungan Climbing Trail is carried out by the Gunung Ciremai National Park Office (BTNGC) in collaboration with the surrounding community under the auspices of the Rimba Cipta Lestari Cooperative (Ricis). This study aims to determine how management and factors as well as efforts are carried out through the collaborative relationship between BTNGC and Ricis using the collaboration process theory proposed by Ansell and Gash (2008). Using a qualitative case study approach, the study involved interviews with informants using purposive sampling techniques, field observations, and document studies. The results of this study explain that collaboration in the management of the Palutungan Climbing Trail began with the initial collaboration between BTNGC and Ricis. The institutional design for the management of the Palutungan climbing trail can be said to have fulfilled the basic elements of collaboration. The leadership of BTNGC was able to facilitate cross-sector dialogue through the Ciremai Tourism Forum and informal approaches that were able to bridge the interests between sectors. The decision-making process prioritizes participation and deliberation, in which each key actor presents their ideas and suggestions at cross-sector forums to design and implement the programs to be developed. The resulting collaborative process has improved the management of the Palutungan hiking trail, developed hiking tourism, and provided economic benefits to the local community. The inhibiting factors are limited communication and the quality of human resources, which have resulted in low participation in collaborative activities. The assistance, monitoring, and evaluation activities of BTNGC are steps to improve communication and human resource quality for better collaboration between BTNGC and Ricis in managing the Palutungan hiking trail.

**Keywords:** Collaboration, Cooperation Agreement, Climbing Management, National Park

### Introduction

The strengthening of nature tourism management is encouraged by national policies as stipulated in Government Regulation No. 36 of 2010 concerning Nature Tourism Management in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks and Nature Parks, as well as various derivative regulations such as Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.44/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Forestry Number P.85/Menhut-II/2014 concerning Procedures for Cooperation in the Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas.

Nature tourism, as a multidimensional sector, has great potential to be developed to increase foreign exchange earnings, create jobs by increasing the income of local communities, and be utilized to improve the quality of society so that it can preserve and protect culture and natural resource heritage. In addition, one of the principles of nature tourism is that it can be organized to empower communities, which is in line with the process of tourism management in Indonesia, where community-based management has been widely implemented. This process can be carried out through collaboration between sectors and stakeholders.

Gunung Ciremai National Park (TNGC) is a conservation area known as one of the tourist destinations in West Java with its natural conditions, making it a complete tourist potential starting from Mount Ciremai, campgrounds, waterfalls or curug, and other tourist destinations. Mount Ciremai is a favorite mountain for climbers with a peak height of 3,078 meters above sea level, offering exotic natural beauty. As the highest mountain in West Java Province and with its rich cultural history, Mount Ciremai attracts nature lovers from all over the country.

The Palutungan Climbing Trail is one of the climbing trails on Mount Ciremai located in the TNGC area, which is a favorite and leading special interest tourist attraction. In 2024, there were 16,885 climbers. This number is higher than in 2022, which had 10,179 climbers, and 2023, which had 10,142 climbers. The management of the Palutungan hiking trail involves several parties, including the Gunung Ciremai National Park Office (BTNGC) as the regulator and the Rimba Cipta Sejahtera Cooperative (Ricis) as the operator of the Palutungan hiking trail. The two parties have entered into a cooperation agreement between the Gunung Ciremai National Park Office and the Rimba Cipta Sejahtera Cooperative, number: PKS.112/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 and number: 03/KOP.RICIS/XII/2021 regarding the Strengthening of the Functions of Gunung Ciremai National Park and Biodiversity Conservation through Institutional Strengthening and Nature Tourism Development in the ODTWA Palutungan Climbing Trail.

This collaboration has been in place since 2021, and there are still several issues in its management. This can be seen in the Cooperation Agreement (PKS) that has been drafted and agreed upon, but the implementation of the PKS has not been carried out optimally. This is due to the limited human resources (HR) managing the Palutungan hiking trail, a lack of understanding of the contents of the PKS, and weak commitment among those involved in the collaboration to manage the Palutungan hiking trail. The collaborating parties, namely BTNGC and Ricis, must clearly understand their respective roles and responsibilities in the management process. This will enable the collaboration to achieve its goal of enhancing and developing tourism.

A number of previous studies have examined the application of collaboration in tourism management in various regions. Wayan Suteja et al. (2021) studied partnership collaboration in the management of ecological tourism villages in the Kotaraja geopark area of East Lombok Regency and found joint programs that could support tourism development. This can be done by applying a partnership management model to build strong tourism management.

Meanwhile, Ramadhani et al. (2022) in their research on the management of Mount Sumbing climbing tourism development (case study: Dukuh Seman climbing route) found tourism potential, tourist profiles, factors influencing tourist demand, economic valuation estimates, the role of stakeholders, and climbing tourism development strategies.

From a public administration perspective, collaboration is working together or, in other words, working with several related parties in an activity to achieve a goal (Retno, 2020). Kurniasari's (2022) research shows that the success of managing tourist attractions on Abang Island is due to good collaboration between the Batam City Government and the Tourism Office.

Based on the above description, the author is interested in conducting further research in order to compile a thesis entitled: Collaboration in the Management of the Palutungan Climbing Trail in Mount Ciremai National Park.

## **Research Methodology**

This research was conducted at the Gunung Ciremai National Park Office using qualitative methods with a case study approach. This approach was used to gain an in-depth understanding of the form of collaboration in the management of the Palutungan hiking trail in Cisantana Village, Cigugur District, Kuningan Regency, West Java Province. The qualitative approach allowed researchers to explore the meanings, perspectives, and experiences of actors directly involved in the management of the Palutungan hiking trail in Gunung Ciremai National Park.

Steven Dukeshire and Jennifer Thurlow (2002) define qualitative research as research that deals with non-numerical data, collecting and analyzing narrative data. It is mainly used to obtain rich, in-depth information about issues or problems to be solved. This method uses focus groups, in-depth interviews, and participatory observation to collect data.

Furthermore, Creswell (2009) states that qualitative research means the process of exploring and understanding the meaning of individual and group behavior, describing social or humanitarian issues. The research process includes creating research questions and procedures that are still tentative, collecting data in the participant setting, inductive data analysis, building data into themes, and then interpreting the meaning of the data.

The type of research used in this study is a case study. A case study is a strategy in qualitative research methods that allows researchers to investigate a phenomenon in depth and holistically in the context of real life. According to Creswell (2014), a case study is a type of qualitative research in which researchers conduct an in-depth exploration of programs, events, processes, and activities involving individuals or groups. A case is bound by time and activity, and researchers collect data in detail using various data collection procedures and over a continuous period of time.

Informants in this study were BTNGC (Cooperation Coordinator, Climbing Formulator, Head of the Kuningan SPTN I Utilization Resort, Palutungan Trail Supervisor), Ricis (Chair, Secretary, Treasurer, Members), Head of the Kuningan Regency Tourism Office, Head of the Kuningan Regional Disaster Management Agency (BPBD), Chair of the Edelwis Cooperative, Akar NGO, Chair of the Ciremai Forum, Rangers, and community members. The data collection techniques used in this study included literature review, observation, interviews, and documentation. Data validity was achieved by using a data collection process involving data triangulation. Data analysis is divided into three activities carried out simultaneously, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

## **Theoretical Review**

Partnerships between the government and non-governmental institutions can be divided into several areas of partnership, namely: (1) collaboration between government institutions (internal), (2) collaboration between government institutions and business institutions; and (3) partnerships between the government and civil society organizations (Dwiyanto, 2011).

Collaboration is an activity that is fundamentally based on social network management. A social network is a network of communication nodes between stakeholders. Based on this understanding, it can be concluded that collaboration theory is an analysis of the governance process from the perspective of social networks. The collaborative governance model requires all stakeholders to be involved in dialogue, where these stakeholders represent themselves in expressing their interests (Booher and Innes, 2002).

According to O'Leary and Bingham (Sudarmo, 2015), collaboration is a concept that describes the process of facilitating and implementing multi-organizational involvement to solve problems that cannot be easily solved by a single organization. This opinion is supported by Bardach (Sudarmo, 2015), who defines collaboration as a form of joint activity by two or more institutions working together to increase "public value" rather than working independently.

Meanwhile, according to Simatupang and Sridharan (2008), collaboration is an effort to bring together various parties with diverse interests, with the aim of achieving a shared vision, reaching agreement in facing problems, finding solutions to those problems, and promoting shared values to produce decisions. Leever (2010) also has a similar view, stating that collaboration is a concept that combines the thoughts of certain parties in an effort to work together. From these two definitions, it can be concluded that collaboration is a solution to overcome the limitations faced by individuals or organizations.

Ansell and Gash (2008) in their journal *Collaborative Governance in Theory and Practice* formulated a *collaborative governance* model based on a literature review. The conclusions of this review are described in four main variables, namely: initial conditions, institutional design, leadership, and collaboration processes.

### **1). Initial conditions**

The initial conditions that influence the collaboration process include the following conditions, which can either support or hinder cooperation between stakeholders, and between institutions or organizations and stakeholders. There are three major variables in these initial conditions, namely: imbalance between influence or power, resources, stakeholder knowledge, past history in the form of previous cooperation or conflicts between stakeholders, and the form of encouragement and obstacles to participating in collaboration.

### **2). Institutional Design**

Institutional design refers to the basic rules of collaboration, which are very important because they provide procedural legitimacy to the collaboration process. The emphasis in institutional design is on the rules for participating in collaboration, how forums are formed, clear implementation rules, and transparency in the collaboration process.

### **3). Leadership**

In collaboration, it is very likely that there will be high levels of conflict or disagreement and a great deal of mistrust between stakeholders. However, on the other hand, there is usually a strong desire among stakeholders to participate. This is where leadership that is acceptable and trusted by stakeholders is needed, who can be relied upon as mediators in the collaboration. Strong leadership that is respected and trusted by all stakeholders is essential in a collaboration because it will make the collaboration more successful. This strong leadership usually emerges from the stakeholder community itself.

### **4). Collaborative process**

The beginning of the collaboration process is very difficult to determine. The collaborative process can start from any of the five processes:

#### **a. Face-to-face dialogue**

All *collaborative governance* is built on the basis of "dialogue between stakeholders." This dialogue is a process oriented toward the emergence of consensus or agreement. Stakeholder dialogue is usually conducted to identify opportunities by promoting the narrative that collaboration will result in a "mutually beneficial" situation for all stakeholders.

#### **b. Building trust**

Building trust is inseparable from the dialogue process. Collaborative leaders must be able to build trust among stakeholders. The process of building trust is a long-term process that takes time and requires a high level of commitment.

#### **c. Commitment in the collaboration process**

The existence of a high degree of interdependence among stakeholders is likely to increase commitment to collaboration. It should be emphasized that collaboration is not a one-time agreement but a process of continuous and mutually beneficial cooperation.

#### **d. Common understanding**

At some point, stakeholders must be able to develop a shared understanding of what can be achieved. This shared understanding can take the form of clear common goals, a clear definition of the problems faced, and a shared understanding of the values to be achieved through collaboration.

#### **e. Interim (mid-term) results**

Collaboration is more likely to continue when the results of the objectives and benefits of collaboration can be felt tangibly, even if they are still small as an intermediate result of the collaboration process. These small wins can be a driving force in building trust and shared commitment among stakeholders.

### **5) Outcomes of Collaboration in the Management of the Palutungan Climbing Trail**

The outcome of this collaboration can be in the form of changes or expected results from the collaboration process, which covers several aspects, namely: the quality of collaborative decisions, the effectiveness of collaboration implementation, the social and environmental impact of collaboration, and increased collaboration capacity. Thus, the outcome variable covers broad aspects, not only focusing on the final result, but also on the collaboration process and its impact on the stakeholders involved.

## **Results and Discussion**

Based on Government Regulation No. 36 of 2010 concerning Nature Tourism in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Parks, and its derivative regulation, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Forestry Number P.85/Menhut-II/2014 concerning Procedures for Cooperation in the Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas, that the implementation of cooperation is to facilitate the needs of partners and the community and to accommodate issues surrounding conservation areas.

This study focuses on collaboration in managing the Palutungan climbing trail in Gunung Ciremai National Park. This study emphasizes how BTNGC collaborates with Ricis in managing the Palutungan

climbing trail through a cooperation agreement (PKS) and other *stakeholders* who support the collaboration. It also identifies the factors that support and hinder the implementation of this collaboration.

Collaboration in managing the Palutungan hiking trail involves the active participation of various parties, with BTNGC or the government as the *leading sector* responsible for policy-making. Based on field observations, factors that support and hinder collaboration have been identified, prompting BTNGC to overcome these obstacles in order to realize collaboration for the improvement and development of sustainable tourism. These efforts also emphasize the importance of increasing the participation of all *stakeholders* so that the goals of sustainable tourism development can be optimally achieved.

In the context of managing the Palutungan hiking trail in Gunung Ciremai National Park, we analyzed it using the *Collaborative Governance* theory from Ansell and Gash (2008) as the main conceptual framework. This theory emphasizes important components in an effective collaboration process.

### **1. Starting Conditions**

The initial conditions of the collaboration between BTNGC and Ricis in managing the Palutungan climbing route. Initially, before it was designated as a National Park through a Declaration by the Minister of Forestry, management was still carried out by Perhutani. Perhutani then handed over management of the hiking trails to the community and directed them to form a group to obtain a service permit. The Rimba Cipta Lestari Cooperative (Ricis) was then formed and bound by a Cooperation Agreement (PKS) with BTNGC. After that, the Mount Ciremai Hiking Management Partner (MPPGC) was formed.

The collaborative process in managing the Palutungan hiking trail is based on managing, preserving, and optimizing businesses in the field of forestry based on special interest nature tourism or Mount Ciremai hiking. In this process, BTNGC has limitations in terms of human resources (HR), meaning that they cannot work alone. Additionally, as a means to realize the vision and mission of BTNGC, this collaboration aims to benefit the communities surrounding the Gunung Ciremai National Park (TNGC) through community empowerment facilitated by Ricis. This collaboration is expected to optimize the potential of the TNGC area as a national asset and provide benefits to all parties involved.

All parties have agreed to a partnership through the PKS, and the parties who have agreed are not only BTNGC and Ricis, but the surrounding community also strongly agrees with and supports this partnership. The community feels that this partnership has a positive impact on supporting their economic activities, one of which is by providing opportunities to become rangers, guides, porters, motorcycle taxi drivers, home stay providers, and kiosk owners to trade around the Palutungan hiking trail area. This process has resulted in:

- a. The emergence of a shared awareness of the importance of collaboration in managing the Palutungan hiking trail.
- b. The opening of communication channels between collaborating actors through regular forums such as the Ciremai tourism forum.
- c. Initial trust is built among actors, especially during the successful management of the Palutungan hiking trail.
- d. The emergence of successful leadership in responding to early challenges.

### **2. Institutional Design**

Within the framework of collaboration, institutional design is an important component that ensures procedural legitimacy, namely a set of basic rules that frame interactions between actors in the collaboration process. Ansell and Gash (2008) emphasize that effective institutional design must be able to provide clarity on the roles, responsibilities, and procedures for cooperation between the government and other stakeholders. BTNGC acts as the main architect in establishing proactive and transparent regulations and policies that are capable of building trust among the actors involved.

In the context of managing the Palutungan climbing route, institutional design has been supported by a number of regulations that form the basis for collaboration, including:

- Government Regulation No. 36 of 2010 concerning Nature Tourism Business in Wildlife Reserves, National Parks, Grand Forest Parks, and Nature Parks.
- Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number

P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Forestry Number P.85/Menhut-II/2014 concerning Procedures for Cooperation in the Management of Nature Reserves and Nature Conservation Areas.

- Cooperation Agreement between the Gunung Ciremai National Park Office and the Rimba Cipta Sejahtera Cooperative number: PKS.112/T.33/TU/HMS.2.0/12/2021 and number: 03/KOP.RICIS/XII/2021 on Strengthening the Function of Gunung Ciremai National Park and Biodiversity Conservation through Institutional Strengthening and Nature Tourism Development in the ODTWA Palutungan Climbing Trail.
- Mount Ciremai Hiking Procedures.

The existence of this regulation not only provides a legal and procedural basis for the implementation of collaboration, but also forms institutional structures and mechanisms that ensure transparency and accountability. The institutional design outlined in the PKS has identified the direction of ecotourism-based development, which includes biodiversity conservation and community empowerment in the form of nature tourism involving local communities and improving the quality of infrastructure on hiking trails. This plan also includes a collaboration strategy in the collaboration scheme to ensure that tourism development is not only based on economic growth, but also upholds the sustainability values of the TNGC area.

The collaborative process in managing the Palutungan climbing route has been carried out with reference to a clear and structured regulatory framework. The clarity of these rules has encouraged synergy between stakeholders. BTNGC not only sets rules, but also performs a facilitation function by providing infrastructure and institutional support for Ricis. On the other hand, the active participation of the Kuningan Regency Tourism Office, the Kuningan Regency Disaster Management Agency, the Akar NGO, and the Ciremai Forum actively strengthens the control function in the management of the Palutungan hiking trail.

The institutional design for managing the Palutungan climbing route can be said to have fulfilled the basic elements of collaboration, namely an inclusive discussion forum, a clear division of roles, and strong rule legitimacy.

### **3. Facilitative Leadership**

Leadership in the collaboration for the management of the Palutungan hiking trail is carried out by BTNGC in a facilitative leadership role, acting as the main driver of collaboration. BTNGC has a strategic role in building commitment and mobilizing all elements towards the goal of improving and developing community-based nature tourism on the Palutungan hiking trail.

BTNGC leadership is able to facilitate cross-sector dialogue through the Ciremai Tourism Forum and informal approaches that bridge interests between sectors. This leadership creates a safe space for all parties to discuss challenges and seek solutions together.

One innovation that has emerged from this facilitative leadership style is a community-based tourism program. This program is designed as a form of collaboration based on local wisdom, requiring the local community to play an active role in managing the Palutungan hiking trail.

BTNGC encourages empowerment and learning efforts by providing guidance to Ricis members through institutional capacity building for community groups in the form of SAR training, mountain guiding, organizational management training, comparative studies on nature tourism management, waste management, and food and beverage provision training. This model strengthens synergy and accelerates the dissemination of information to create contextual solutions.

In dealing with differences in interests, leadership also plays an important role in resolving conflicts and building agreements. An open deliberation process becomes the main mechanism for reducing potential tensions, so that collaboration can continue in a spirit of togetherness and shared responsibility. This process results in:

- a. The growth of trust among actors thanks to a participatory and open leadership style.
- b. Increased engagement between sectors through regular meetings.
- c. Implementation of community empowerment programs as collaborative innovations based on community management.
- d. The emergence of tourism development innovations on the Palutungan hiking trail.
- e. Increased involvement of leaders in improving the institutional capacity of groups.

- f. A dialogue-based conflict resolution mechanism that supports the sustainability of Palutungan hiking trail management.

#### **4. Collaborative Process**

The collaborative process in managing the Palutungan climbing route is an approach that emphasizes the importance of synergy between actors, both from BTNGC and Ricis. In a collaborative approach, the process is a key element that determines the quality and success of the collaboration, not just the final outcome. One concrete form of this process is the involvement of key actors, namely BTNGC and Ricir, in the management of the Palutungan hiking trail. Key actors formulate solutions based on the needs of trail management.

The decision-making process prioritizes participation and deliberation, in which each key actor presents their ideas and suggestions at a cross-sector forum to design and implement the program to be developed. The dynamic of this collaboration is the management of the Palutungan climbing trail, which will be managed by local community partners.

Transparent communication is the foundation of this collaboration. Through cross-sector communication, each stakeholder conveys their opinions accompanied by supporting data. This transparency supports data-based planning and fosters trust among stakeholders.

To ensure the sustainability of the collaboration, regular communication forums are held, both formal and informal, as a space to remind each other, update information, and solve problems together. There are five important elements in the collaboration process:

##### **a. Face-to-Face Dialog**

In managing the Palutungan climbing route, face-to-face dialogue is the main means of aligning perceptions, setting a common agenda, and formulating policies that are responsive to local needs. The Ciremai Forum, as a forum for nature tourism businesses on Mount Ciremai, is one concrete example of this face-to-face dialogue. This forum serves as a deliberative space where actors can sit together to discuss various strategic aspects of the tourism sector. Some of the main topics that are often discussed include the carrying capacity and capacity of climbers, standard operating procedures for climbing Mount Ciremai, the potential for improving services to climbers, regional income from the tourism sector, and the promotion of climbing.

This meeting also serves as a forum for collective evaluation and problem solving. Stakeholders can convey the obstacles they face in the field and formulate solutions in a participatory manner. Thus, face-to-face dialogue is not merely a communication forum, but has become a strategic instrument in shaping adaptive and collaborative governance. The sustainability and effectiveness of such forums depend heavily on the consistency and frequency of their implementation. The more regular and structured the face-to-face dialogue is, the greater the opportunity to overcome information gaps and strengthen relationships between actors, which is crucial to the success of long-term collaboration in managing the Palutungan climbing route.

##### **b. Trust Building**

This process takes place gradually through intensive interaction between the main actors in the management of the Palutungan climbing route. Trust is not formed instantly, but grows along with open communication, fair information sharing, and the involvement of the community around the TNGC area. One strategy for building trust is to involve community leaders, religious leaders, and youth leaders as bridges between BTNGC and the community.

The active participation of these figures in enhancing the legitimacy of the program in the eyes of the local community, who have an emotional attachment to educational and mentoring efforts, demonstrates that trust is built on consistent actions, policy transparency, and equal dialogue.

The process of building trust with the local community involves sharing success stories from other places that have implemented collaborations to foster confidence that collaboration with BTNGC in managing the Palutungan climbing route will have a real impact. Continuous cross-sector meetings ensure the sustainability of collaboration through formal and informal meetings with the local community. Consistent meetings will foster cooperation and gradually build mutual trust between BTNGC and the local community to collaborate.

##### **c. Commitment to the collaboration process**

The commitment between BTNGC and Ricis in collaborating to manage the hiking trail remains

strong. Ricis members appear to lack responsibility, showing that they do not have a strong commitment to achieving common goals. Many members of the community have yet to participate in the management of the Palutungan hiking trail because many young people choose to migrate in search of more secure jobs. In the collaboration that has taken place, there is a lack of mutual dependence, resulting in suboptimal collaboration.

**d. Shared Understanding**

There is still a lack of understanding among the parties involved regarding the vision or objectives of managing the Palutungan climbing route. This is evident in the fact that several Ricis parties are still unable to articulate their desired vision, and even Ricis members are unaware of its vision and mission. The objective understood by the various parties is essentially the same, namely to improve the welfare or economy of the community. This lack of understanding of the vision and mission could lead to problems in the future, especially since the methods for achieving these shared goals differ. This shows that the shared understanding in this collaboration is not yet optimal.

**e. Intermediate Outcomes**

Intermediate outcomes in the collaboration on the management of the Palutungan hiking trail refer to the Cooperation Agreement (PKS) and small wins. The immaturity of the implementation of the Cooperation Agreement (PKS) by Ricis has slowed down the collaboration process between the Gunung Ciremai National Park Office and Ricis. This can be demonstrated by the fact that several obligations outlined in the PKS, which are Ricis' commitments in the collaboration process, have not been fulfilled.

In addition to the Cooperation Agreement (PKS), other achievements from the collaboration include small wins, which consist of:

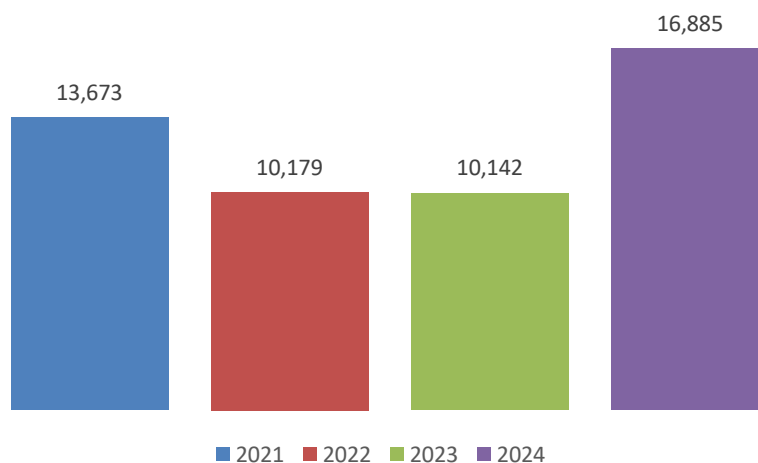
- The development of supporting facilities and infrastructure for nature tourism (climbing Mount Ciremai).
- Capacity building for community groups in the form of training.
- Climbing services provided by rangers on the Palutungan climbing trail.
- Promotion of hiking tourism through social media and exhibitions (festivals).
- Economic improvement for the surrounding community by creating jobs and supporting local economic development.

**5. Outcome of Collaboration in the Management of the Palutungan Hiking Trail**

The theoretical framework of collaboration by Ansell and Gash (2008) resulted in the following collaboration process in the management of the Palutungan hiking trail:

a. Improving the management of the Palutungan hiking trail

The tangible result of the collaboration in managing the Palutungan climbing route is an increase in the number of climbers on Mount Ciremai.



**Figure 1 Number of Climbers on the Palutungan Trail**

b. Development of hiking tourism

This collaboration has resulted in the development of Mount Ciremai hiking tourism in the form of Cigowong Hiking. This tourism development innovation has become a favorite among beginner hikers. For those who are not yet ready to climb to the summit of Mount Ciremai, Cigowong Hiking is an option to experience light hiking because it only goes as far as post 1 of the Palutung hiking trail.

c. Providing economic benefits to the local community.

Collaborative management of the Palutungan hiking trail provides an opportunity to demonstrate the role of BTNGC in alleviating poverty and providing sustainable livelihoods in villages surrounding the TNGC area, which have been largely overlooked by development programs. The community feels that this collaboration has had a positive impact on supporting their economic activities, including by providing opportunities to become rangers, guides, porters, motorcycle taxi drivers, home stay operators, and to own kiosks and stalls to trade around the Palutungan hiking trail area.

d. The relationship between BTNGC and the local community has changed from conflict to participation, partnership, and collaboration.

The TNGC area was initially designated to protect wildlife, plants, water catchment areas, and natural resources within it that were free from human presence. This view has now begun to change to joint management of TNGC with the community. Awareness of the importance of securing the livelihoods of the local community in a sustainable manner and improving the welfare of the communities around the TNGC area has encouraged collaboration involving all stakeholders: BTNGC, the local community, natural resource users, and other relevant agencies. Conservation programs for development are very important in building social capital, local capacity, and institutions to strengthen the management of the TNGC area.

e. Collaboration is an important management tool in the management of the Palutungan hiking trail.

The collaboration process can build and strengthen partnerships between BTNGC and local communities and involve relevant stakeholders in the management of the Palutungan hiking trail. The collaboration process includes various activities to develop a shared vision and goals, build mutual trust, mutual respect, and mutual benefits between the collaborating parties, namely BTNGC and Ricis.

f. Challenges and evaluation

Collaboration has led to significant progress, but there are several challenges, namely limited resources, weak monitoring systems, and a lack of assistance. The results of collaboration are dynamic and must be evaluated periodically to ensure the sustainability of Palutungan climbing route management.

### **Barriers to Collaboration and Efforts to Overcome Them**

Some factors hinder collaboration in the management of the Palutungan hiking trail. These obstacles are related to communication and the social and cultural dynamics of the community.

**a. Suboptimal Communication**

This has resulted in many members of the community or Ricis who still do not understand the objectives, benefits, or their role in managing the Palutungan climbing route. This limited communication has led to low participation in collaborative activities. The lack of information has caused a gap in understanding between BTNGC and Ricis as well as other actors. This weakens the sense of ownership of the hiking tourism development program and increases the potential for conflict and social resistance. To overcome these obstacles, a more inclusive and community-based communication strategy is needed to ensure that all parties involved have the same understanding of the objectives, benefits, and their roles in managing the hiking trail. In addition, providing assistance to the community and RICIS members to improve the effectiveness of information dissemination and community involvement in the management of the Palutungan hiking trail, as well as increasing community participation in collaborative activities with relevant information and enabling them to actively participate in the decision-making process.

**b. Quality of Human Resources**

The quality of human resources (HR) is an important pillar in supporting the success of

collaborative governance. The competence of the actors involved, both from BTNGC, Ricis, and the community, determines the effectiveness of cooperation and decision-making. The creation of annual work plans and their implementation and reporting are important things to carry out. Monitoring and evaluation of solutions for the sustainability of Palutungan climbing route management. Many community members still frequently build structures without permits and without adequate infrastructure and facilities. Additionally, BTNGC has not been able to station personnel on hiking trails and other tourist sites because these areas are controlled by the local community. To overcome these obstacles, efforts can be made to improve the quality of human resources through training and development, raise awareness, and foster cooperation with the community, as well as strive to enhance adequate infrastructure and facilities. Thus, BTNGC management can be carried out more effectively and safely.

## Conclusion

The results of the study show that collaboration in the management of the Palutungan climbing route, as seen through Ansel and Gash's *collaborative governance* model, has not been fully implemented due to a lack of commitment and understanding in achieving the objectives. The interim results do not yet have mandatory targets in the Cooperation Agreement (PKS). The inhibiting factors are limited communication and the quality of human resources, which have an impact on low participation in collaborative activities. In addition, there are still many people who build structures without permits and with inadequate facilities and infrastructure. Furthermore, BTNGC has not been able to assign officers to the hiking trail due to limitations in the quality and quantity of human resources required to carry out the tasks in accordance with their mandate. Although BTNGC officers are currently divided according to their main duties and functions, the scope of their tasks is still not balanced. Activities through assistance, monitoring, and evaluation by BTNGC, as well as improving the quality of human resources through training and development, are steps to improve communication and the quality of human resources in the collaborative process between BTNGC and Ricis in managing the Palutungan hiking trail.

## References

- Anindisa, M., Basuni, S., Sunarminto, T. (2017). *Stakeholders of Nature Tourism Management in SPTN Area II Majalengka, Gunung Ciremai National Park*. Department of Forest Resources Conservation and Ecotourism, IPB.
- Ansell, C., & Gash, A (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. Oxford University Press.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachmi, Abd. (2020). *Collaborative Governance from the Perspective of Public Administration*, Diponegoro University Press, Semarang.
- Aulia, F. (2021). *Tourism Development Collaboration in Kubu Gadang Tourism Village*. Padjajaran University.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. Oxford University Press.
- Heriyoko, Y. (2023). *Collaborative Governance in the Development of the Keputih Bamboo Forest Tourist Attraction in Surabaya*. 17 Agustus 1945 University, Surabaya.
- Hidayat, R., Marsono, D., et al. (2020) Social Capital of Communities in the Buffer Zone of Gunung Ciremai National Park to Support Partnership-Based Management Schemes. Faculty of Forestry, UGM.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UIPress. Jakarta.
- Imtiyaza, H. et al. (2024). *Collaborative Governance in the Development of Kaliwlingi Tourism Village in Brebes Regency*. Diponegoro University.
- Inama., Suharjo, D., Trison, S., (2024) *Livelihood Strategies for Conservation Partnership Groups in Gunung Ciremai National Park*. Faculty of Forestry and Environment, IPB.
- Khofipatu, I., Myrta, R., & Candradewini. (2023). Collaboration in the Management of Gunung Galunggung Tourism Forest in Tasikmalaya Regency. *Journal of State Administration*.
- Khofipatu, Iva, Myrta, Rita, & Candradewini, 2023, *Collaboration in the Management of Gunung*

- Galunggung Tourism Forest in Tasikmalaya Regency*, *Journal of State Administration*.
- Kurniasari, R. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wisata Maritim di Kota Batam= Collaboration of Local Governments in Maritime Tourism Management in Batam City*.
- Mahmud, H., & Kasmahidayat. (2025). *Analysis of the Potential of Mount Merbabu National Park for Ecotourism Development*. Indonesia University of Education
- Miller, G. T. (2007). *Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions*. Thomson Brooks/Cole.
- Moleong, L. J. (2002). *Qualitative Research Methodology*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49–55.
- Pereira, N. A. (2022). *Empowerment of the Community of Cisantana as a buffer village of Gunung Ciremai National Park through Ecotourism Program*.
- Pratiwi, S., & Alikodra, H. S. (2021). *Ecotourism Assessment in Gunung Halimun National Park*.
- Purbantoro, N. S. (2022). *The Influence of Tourist Attractions on the Interest in Returning to Mount Merbabu National Park (Case Study of the Via Selo Climbing Route)*.
- Rossada, D., & Prihatini, E. R. (2012). *Collaborative Management of National Parks in Indonesia*. IPB Press.
- Syamsudin, T., Kosmaryandi, N., & Nopiansyah, F. (2020). *Evaluation of Natural Tourism Objects Potential in Nature Tourism Resort Kuningan National Park Management Section I Gunung Ciremai National Park*.
- Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (2010).
- Triana, E., & Alikodra, H. S. (2014). *Conservation Collaboration in the Ciwidey Tourism Area*.
- Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2017). *Collaboration in the Management of the Gunung Masigit Kareumbi Hunting Reserve Conservation Area in West Java Province*.
- Vandayani, D. S., & Widiyarta, A. (2022). *Collaborative Governance in the Development of Kampung Majapahit as a Tourist Village in Bejjong Village, Trowulan District, Mojokerto Regency*.
- Wardojo, W. (2021). *Inspiration from Mount Gede Pangrango*. Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation.
- Wismayanti, K. W. (2024). *Collaborative Governance*. Deepublish.
- Zuhriana, R., & Alikodra, H. S. (2013). *Employment Opportunities Enhanced for Local Community Based on Ecotourism at Gunung Ciremai National Park*.

Date: 15 Dec, 2025

To

Agus Anto Juanto, Aprilia Sabila Putri, Moh. Taufik Hidayat, Nursahidin

Subject: "[ Collaboration In The Management Of The Palutungan Climbing Route In Ciremai Mountain National Park]"

We are pleased to inform you that your manuscript titled "*Collaboration In The Management Of The Palutungan Climbing Route In Ciremai Mountain National Park*" Paper ID: AIS-025-677 has been accepted for publication in the journal of Architecture Image Studies.

Your article underwent extensive peer review, and the reviewers and editorial board determined it to be of high quality and relevant to our readership. We feel that your study will make an important addition to the discipline.

Architecture Image Studies (AIS) is abstracted and indexed in:

- Scopus indexed
- EBSCO - Art & Architecture
- Directory of Open Access Journals
- BASE - Bielefeld University Library

Congratulations again on the acceptance of your paper. We look forward to having your work published in our publication and continuing to contribute to the academic community.

Thank you for selecting the Architecture Image Studies as the forum for publishing your research findings.

Regards,



Lara Ross

*Architectural Image Studies*, 2184-8645

<https://journals.ap2.pt/index.php/ais>

<https://www.scopus.com/sourceid/21101247624>

Architecture Image Studies

E-mail: [editor@ap2.pt](mailto:editor@ap2.pt)

URL: <https://journals.ap2.pt/index.php/ais/issue/archive>

### **Reviewer Report Form**

<b>Manuscript Title</b>	Collaboration In The Management Of The Palutungan Climbing Route In Ciremai Mountain National Park
<b>PAPER ID</b>	AIS-025-677

<b>Sl. No.</b>	<b>Evaluation criteria</b>	<b>Score (0-10)</b>
1.	Introduction	9
2.	Background of Study	8
3.	Literature Review	8
4.	Methodology	7
5.	Sampling	9
6.	Results	7
7.	Analysis	9
8.	Conclusion	8
9.	Recommendations	7
10.	References	8

### **RECOMMENDATION**

The following are indicative score ranges:

ACCEPTED

ACCEPTED WITH MINOR REVISIONS

REJECTED

\* Accept (without Revisions) : 80-100

\* Accept with minor revisions : 60-80

\* Reject : Below 60

## Publication Fee INVOICE

**Date: Dec 15, 2025**  
**Invoice ID: AIS-025-677**

**To**

**Agus Anto Juanto**

Master of Public Administration Study Program Graduate School, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Item Description	QTY	Rate	Amount
Article Publication Fee	1	USD	USD 500
		<b>Total</b>	USD 500

### Bank Account Details




- Beneficiary Bank: Mashreq Bank
- Beneficiary Account Title: Creative Publishing House FZE LLC
- IBAN: AE730330000019101568253
- Swift Code: BOMLAEAD
- Currency: USD
- Bank address: Mashreq Group HQ Building, Plot No 3450782, Umniyati Street (off Al Asayel Street), Burj Khalifa Community, Dubai United Arab Emirates.
- Business Address: Sharjah Publishing City Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

### **Important Note:**

- **Please mention the paper ID on scanned bank receipt and email the scanned copy at: [editor@ap2.pt](mailto:editor@ap2.pt)**
- **If you are willing to pay by credit/ debit card, please write to us. We will send you online payment link in order to pay APC.**

# Agus A.j (124140002) Aprilia.s (124140030)

## Kolaborasi dalam pengelolaan jalur pendakian palutungan pada Taman Nasional Gunung Ciremai

-  Quick Submit
-  Quick Submit
-  Syntax Corporation

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3450416052

Submission Date

Dec 24, 2025, 11:33 AM GMT+7

Download Date

Dec 24, 2025, 11:45 AM GMT+7

File Name

manuscript\_Agus\_Anto\_Juanto.docx

File Size

55.6 KB

14 Pages

6,476 Words

38,632 Characters

# 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography

### Match Groups

- 60 Not Cited or Quoted 15%**  
Matches with neither in-text citation nor quotation marks
- 4 Missing Quotations 2%**  
Matches that are still very similar to source material
- 0 Missing Citation 0%**  
Matches that have quotation marks, but no in-text citation
- 0 Cited and Quoted 0%**  
Matches with in-text citation present, but no quotation marks

### Top Sources

- 15% Internet sources
- 10% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



**PUSAT BAHASA**  
**UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**  
Jl. Pemuda N0.32 Cirebon Kampus 1 Telp. (0231) 206558 ext: 124



A71412019/TEP-Exit/PBU/XI/2025

## TEST OF ENGLISH PROFICIENCY

### For The TOEFL Prediction

This is to certify that

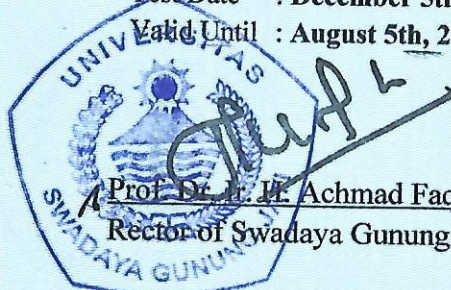
Name : AGUS ANTO JUANTO  
Student Number : 124140002  
Faculty/Department : Graduate Program/Public Administrations S2

has successfully taken the *Test of English Proficiency (TEP)* conducted by Pusat Bahasa UGJ with the result described as follows:

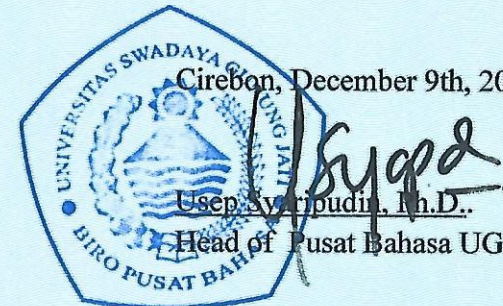
Section	Score	Total Score
Listening Comprehension	45	473
Structure and Written Expressions	47	
Reading Comprehension	50	

Test Date : December 5th, 2025

Valid Until : August 5th, 2027



Prof. Dr. H. Achmad Faqih, S.P., M.M.  
Rector of Swadaya Gunung Jati University



Cirebon, December 9th, 2025

Usep Syarifuddin, M.H.D.  
Head of Pusat Bahasa UGJ

\* For internal use only



**PUSAT BAHASA**  
**UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**  
Jl. Pemuda N0.32 Cirebon Kampus 1 Telp. (0231) 206558 ext: 124



A4906041/TEP-Exit/PBU/VI/2024

## TEST OF ENGLISH PROFICIENCY

For The TOEFL Prediction

This is to certify that

Name : APRILIA SABILA PUTRI

Student Number : 120090109

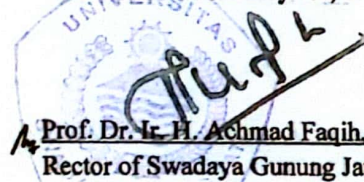
Faculty/Department : Social and Political Sciences/Public Administration


has successfully taken the *Test of English Proficiency (TEP)* conducted by UPT Pusat Bahasa UGJ with the result described as follows:

Section	Score	Total Score
Listening Comprehension	42	457
Structure and Written Expressions	51	
Reading Comprehension	44	

Test Date : June 7th, 2024

Valid Until : February 7th, 2026

  
Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P., M.M.  
Rector of Swadaya Gunung Jati University

  
Cirebon, June 10th, 2024  
Usep Syahputra, Ph.D.  
Head of UPT Pusat Bahasa UGJ

\* For internal use only